***Tulisan Artikel/Opini (Jurnal Eklektika)***

**Kualitas  Kinerja Guru Tanggungjawab Kepala Sekolah & Komite Sekolah**

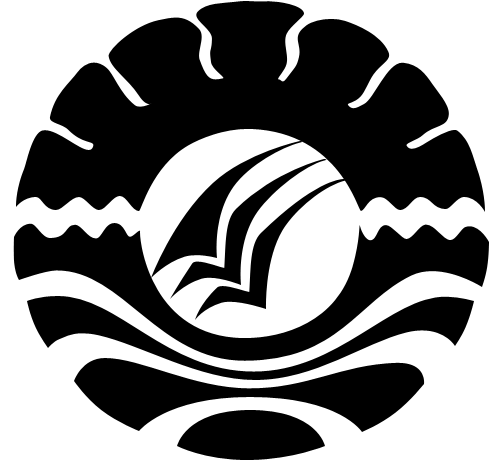
***(Jum’at, 6 Juni 2014, 13:52)***

**&**

**Guru Sebagai Pilar Pembangunan Bangsa**

***(Selasa, 26 November 2013, 20:32)***

**MUHAMMAD ARSYAM**



**MANAJEMEN PENDIDIKAN**

**PROGRAM PASCASARJANA (S2)**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**2015**

*(Tulisan Artikel/Opini)*

**Kualitas  Kinerja Guru Tanggungjawab Kepala Sekolah & Komite Sekolah**

**Jum’at, 6 Juni 2014 13:52**

** Muhammad Arsyam** Pendidikan yang bermutu tinggi atau berkualitas tinggi merupakan harapan setiap warga negara termasuk di Indonesia. Sebab pendidikan yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu pula. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab II pasal 3, menyatakan bahwa ”Pendidikan nasional bertujuan

**( (Mahasiswa PPs UNM)** untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

***Perubahan Kurikulum Pendidikan Nasional***

Selama tahun 2002 dunia pendidikan di negara kita ditandai dengan berbagai perubahan yang serempak, dan dengan frekuensi yang sangat tinggi. Belum tuntas sosialisasi perubahan yang satu, datang perubahan yang lain. Beberapa inovasi yang mendominasi panggung pendidikan selama tahun 2002 antara lain adalah Pendidikan Berbasis Luas (PBL/BBE) dengan life skills-nya, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK/CBC), Manajemen Berbasis Sekolah (MBS/SBM), Ujian Akhir Nasional (UAN) pengganti EBTANAS, pembentukan dewan sekolah dan dewan pendidikan kabupaten/kota. Setiap pembaruan tersebut memiliki kisah dan problematiknya sendiri. Perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan tersebut dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Upaya meningkatkan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada rencana strategis. Keterlibatan seluruh komponen pendidikan (guru, kepala sekolah, masyarakat, komite sekolah, dewan pendidikan, dan institusi) dalam perencanaan dan realisasi program pendidikan yang diluncurkan sangat dibutuhkan dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan.

Apabila ditinjau dari faktor manajemen, khususnya manajemen pendidikan menurut Mantja (2002: 155) “ada tiga faktor utama yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan, yaitu: (1) instrumental sistem pendidikan, (2) sistem manajemen pendidikan, (3) substansi manajemen pendidikan”. Masyarakat mempercayai, mengakui dan menyerahkan kepada guru untuk mendidik tunas-tunas muda dan membantu  mengembangkan potensinya secara professional. Kepercayaan, keyakinan, dan penerimaan ini merupakan substansi dari pengakuan masyarakat terhadap profesi guru. Implikasi dari pengakuan tersebut mensyaratkan guru harus memiliki kualitas yang memadai.

Hal tersebut merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerja guru pada tataran institusional dan eksperiensial, sehingga upaya meningkatkan mutu pendidikan harus dimulai dari aspek “guru” yang menyangkut kualitas keprofesionalannya maupun kesejahteraan dalam satu manajemen pendidikan yang professional. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya guru harus melakukan tugas dan fungsi pokoknya sebagai pendidik, pengajar, pelatih dan pembimbing.

***Kemampuan Supervisional Kepala Sekolah***

Dalam hal peningkatkan kinerja guru salah satunya adalah melalui supervisi pembelajaran. Pelaksanaan supervisi pembelajaran perlu dilakukan secara sistematis oleh kepala sekolah yang bertujuan memberikan pembinaan kepada guru-guru agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Peranan kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi dikelas sangat berpengaruh dalam pelaksanan tugas pokok guru. Namun berdasarkan fakta yang terjadi dalam pelaksanaan supervisi pembelajaran, guru menganggap supervisi pembelajaran sebagai momok yang menakutkan, hal ini disebabkan karena terjadi kesalahpahaman guru dengan kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi. Kesalahpahaman yang dimaksud adalah guru menganggap bahwa supervisi merupakan penilaian administratif atas proses pembelajaran yang dilakukan dikelas. Padahal pada kenyataanya tujuan supervisi adalah untuk membantu guru untuk meningkatkan kemampuannya agar menjadi guru yang lebih baik atau lebih professional.

Menurut Mulyasa (2002), mengemukakan bahwa pada hakikatnya supervisi mengandung beberapa kegiatan pokok, antara lain: pembinaan yang kontinu, pengembangan kemampuan personil, perbaikan situasi belajar mengajar, dengan sasaran akhir pencapaian tujuan pendidikan dan pertumbuhan pribadi peserta didik. Supervisi kepala sekolah merupakan bagian dari aktivitas manajemen pemeriksaan terhadap guru. Guru  harus menunjukkan bukti kinerja pelaksanaan tugasnya, menunjukkan bagaimana membelajarkan siswa, menerapkan kurikulum, dan menyerap pelajaran. Supervisi kepala sekolah dilaksanakan untuk membina, membimbing, dan memotivasi guru dalam melaksanakan tugas profesinya, serta dapat membangkitkan semangat guru dalam melaksanakan tugasnya. Dengan bantuan supervisi para guru akan lebih mengetahui bagaimana mengembangkan mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya, dan mendemontrasikan dengan baik pelajarannya. Dengan demikian akan tampak bahwa supervisi adalah suatu proses melakukan pendekatan yang fleksibel atau tidak kaku, bukan antara atasan dan bawahan tetapi kemitraan dalam arti interaksi profesi kependidikan.

Tujuan akhir dari supervisi adalah peningkatan situasi belajar mengajar, peningkatan proses belajar dan hasil belajar murid. Dalam pelaksanaan supervisi diperlukan strategi-strategi supervisi yang tepat. Dimana Strategi dalam hal ini bisa pula di artikan sebagai teknik. Menurut Rifa’i (1982:94) ”teknik adalah merupakan cara tertentu yang khusus untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu tehnik terdiri dari berbagai kegiatan yang teratur dan beraturan, berdasarkan ketentuan-ketentuan.”

Kepala sekolah hendaknya menguasai paling tidak empat hal pokok dalam supervisi yaitu: teknik supervisi pembelajaran, pendekatan supervisi pembelajaran, prinsip-prinsip supervisi pembelajaran dan tipe-tipe supervisi pembelajaran.

***Peranan Komite Sekolah***

Faktor lain yang turut membantu dalam peningkatan kinerja guru sebagaimana termuat dalam  Undang-undang Sistem pendidikan nasional No 20 tahun 2003,  sistem pendidikan nasional mengalami perubahan paradigma pengembangan pendidikan, dimana salah satu bagian dari UU tersebut membahas tentang manajemen kurikulum dan peran serta masyarakat dalam pendidikan. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah mengenaisistem pendidikan nasional dan desentralisasi, maka pemerintah merasa perlu untuk menerapkan dan mengembangkan model manajemen yang disebut “*School Based Management”*atau Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (Teguh Winarno, 2004:2). *MBS* memberikan wewenang yang lebih luas kepada sekolah untuk mengambil keputusan mengenai pengelolaan sumber-sumber daya pendidikan sekolah (manusia, keuangan, material, metode, teknologi, wewenang dan waktu) yang didukung dengan partisipasi yang tinggi dari warga sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Partisipasi masyarakat melalui Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan diharapkan tidak hanya dalam bentuk materi tetapi juga berupa tenaga dan pemikiran. Dalam kenyataannya peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan masih sangat rendah dan terbatas pada hal-hal yang sifatnya finansial, hal ini disebabkan persepsi sebagian masyarakat bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, bahkan menurunnya kualitas adalah kesalahan guru sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Lampiran II tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dinyatakan bahwa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berperan sebagai: (1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, (2) Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, (3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, dan (4) *Mediator* antara pemerintah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) dengan masyarakat

*\*Guru, Kepala Sekolah & Komite Sekolah adalah*

*Harapan Generasi Anak Bangsa Indonesia Dimasa Yang Akan Datang\**

*(Tulisan Artikel/Opini)*

**Guru Sebagai Pilar Pembangunan Bangsa**

**(Selasa, 26 November 2013, 20:32)**

** Muhammad Arsyam** Dalam kamus besar Bahasa Indonesia tanggung jawab berarti bahwa keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab timbul karena telah diterima wewenang. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung semua resiko atas segala hal yang menjadi tanggung jawabnya. Wujud tanggung jawab juga dapat berupa pengabdian ( **(Mahasiswa PPs UNM)** dan pengorbanan. Pengorbanan adalah perbuatan baik untuk kepentingan manusia itu sendiri. Sedangkan arti ( pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang atau satu ikatan dan semua itu dilakukan dengan ikhlas.

Harapan akan tanggungjawab dan pengabdian dalam mencerdaskan serta memajukan suatu bangsa ada pada seorang guru, maka berdasarkan UU RI No.14 Tahun 2005 (Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen) guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang berarti pula bahwa guru adalah profesi yang mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk menyongsong pembangunan bangsa dalam mengisi kemerdekaan.   
Dengan demikian guru dengan segala kemampuannya dan daya upayanya mempersiapkan pembelajaran bagi peserta didiknya. Sehingga tidak salah jika kita menempatkan guru sebagai salah satu kunci pembangunan bangsa menjadi bangsa yang maju dimasa yang akan datang. Dapat dibayangkan jika guru tidak menempatkan fungsi sebagaimana mestinya, bangsa dan negara ini akan tertinggal dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian waktu tidak terbendung lagi perkembangannya.

Untuk melihat kondisi suatu bangsa yang berkualitas adalah ketika bangsa yang maju pendidikannya, dimana pendidikan adalah penentu sebuah bangsa menjadi berkembang dan berkualitas. Kiranya komitmen dan cara pandang seperti inilah yang seharusnya dimiliki dan tertanam dalam pikiran semua orang dalam bangsa. Karena pendidikan merupakan sesuatu yang sangat vital bagi pembentukan karakter sebuah peradapan dan kemajuan yang mengiringnya. Guru mempunyai tanggung jawab menyusun strategi pembelajaran yang menarik dan yang disenangi siswa, yakni rencana yang cermat agar peserta didik dapat belajar, butuh belajar, terdorong belajar, mau belajar, dan tertarik untuk terus menerus mempelajari pelajaran.

**Kualitas dan Profesionalisme Guru**

“Pendidikan bukanlah segala-galanya, namun segala-galanya berawal dari pendidikan” itulah ungkapan peribahasa yang sangat sederhana namun mengandung makna yang mendalam. Di dalam sebuah sistem pendidikan nasional saat sekarang ini yang begitu kompleks, guru berperan sangat sentral di sana. Kualitas dan profesionalisme seorang guru adalah dengan bagaimana ia mengabdi, bagaimana cara ia mencintai profesinya. Ketika ia mencintai profesinya maka pengabdiannya akan seluruhnya diberikan pada siswa-siswanya, akan mengajarkan yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.  
Sekarang kembali kepada guru itu sendiri bagaimana cara menyikapi diri sebagai pendidik yang profesional, untuk itu guru wajib terus mengembangkan diri di era globalisasi ini, kalau tidak terus mengembangkan diri, guru bisa tertinggal dari siswanya, meskipun belum terima sertifikat profesional apalagi sudah terima sertifikat profesional dan TPP sudah diterima. Tidak ada alasan untuk tidak sempat tetapi harus melakukan sesuatu yang sudah menjadi tuntutan bahwa pengetahuan guru harus selalu terasah dan up to date dan diharapkan semakin dapat meninggkatkan mutu pendidikan dengan penghargaan tersebut.  
Hakekat pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai tiga fungsi, yaitu sebagai pemersatu bangsa, penyaman dan pemberian kesempatan, dan pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat mempererat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dan mengebangkan potensinya.

Dari gambaran di atas dapat di deskripsikan bahwa gutu tersebut tak mengenal lelah dan tempat, guru mengabdi dengan tulus mencerdaskan anak bangsa bukan karena tempat dimana beliau bertugas, tetapi memang karena pengabdian yang tulus untuk mencerdaskan para penerus bangsa. Mereka memang “Pahlawan tanpa tanda jasa” yang benar-benar terus berjuang untuk negeri ini.

Kesediaan seorang guru ditempatkan dipelosok terpencil ataupun di daerah transmigrasi adalah pengabdian yang juga menuntut pengorbanan. Dikatakan pengabdian karena ia mengajar disitu tanpa menerima gaji dari pemerintah, tanpa diurus oleh pihak berwenang usul pengangkatannya, ia hanya bertanggung jawab untuk kemajuan dan kecerdasan masyarakat atau bangsanya. Ia hanya menerima penghargaan dan belas kasihan dari masyarakat setempat. Pengorbanan yang ia berikan berupa tenaga, pikiran, waktu untuk kepentingan anak didiknya.Tanggung jawab guru yang terpenting adalah merencanakan dan menuntut murid-murid melakukan kegiatan-kegiatan belajar untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan serta membina kurikulum sekolah.

Selain itu tanggung jawab seorang guru juga dengan membina siswa agar menjadi manusia berwatak (berkarakter), yang sudah pasti bukan pekerjaan yang mudah. Mengembangkan watak dan kepribadiannya para siswa, sehingga mereka memiliki kebiasaan, sikap, cita-cita, berpikir dan berbuat, berani dan bertanggung jawab, ramah dan mau bekerja sama, bertindak atas dasar nilai-nilai moral yang tinggi, semuanya menjadi tanggung jawab guru.  
Dengan demikian tugas dan tanggungjawab guru tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia tidak terikat oleh keterbatasan jam dan kelas untuk mendidik. Karena proses belajar tidak hanya dilakukan di sekolah namun dibutuhkan di lingkungan untuk membentuk karakter dan kepribadian siswa, atau sekurang-kurangnya dapat membentuk landasan yang berarti untuk bekal siswa selanjutnya.   
Dalam memahami betapa pentingnya peran guru sebagai pilar pembangunan moral generasi muda bangsa, maka pribadi unggul pada idealism guru dalam arti kemurnian pengabdian untuk mendidik adalah yang utama. Pemerintah dalam hal ini sebagai penyelenggara pendidikan nasional perlu lebih memperhatikan proses perekrutan tenaga guru tersebut dengan proses yang ketat dan juga transparan, misalnya menekankan aspek moralitas pada kompetensi karakter kepribadian.

“Selamat Hari Guru, Bangga Kami\*